

LKIP DISHUB TAHUN 2024



DISHUB
Kota Bandung



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pemerintah Kota Bandung



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan karunia — Nya dalam membimbing dan memberikan kekuatan sehingga dokumen Laporan Kinerja Instransi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Tahun 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instransi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada Kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga apa yang dirumuskan dalam LKIP Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait.

Kota Bandung, Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Perhubungan

Kota Bandung


ASEP KUSWARA, AMa.PKB, ST, MM
NIP. 196708081992031007



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan	I-2
C. Tugas dan Fungsi	I-3
D. Isu Strategis	I-4
E. Landasan Hukum.....	I-5
F. Sistematika	I-6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	II-1
A. Rencana Strategis	II-1
B. Indikator Kinerja Utama	II-4
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	II-6
2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu.....	II-7
A. Rencana Strategis Hasil Reviu	II-7
B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu.....	II-8
C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu.....	II-11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	III-1
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	III-3
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	III-5
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. Kesimpulan.....	IV-1
B. Rekomendasi.....	IV-3
C. Tindak Lanjut LKPI	IV-3
D. Saran	IV-4



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).



Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 21 Tahun 1997, Dinas Perhubungan Kota Bandung dibentuk berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Sebelum berubah menjadi Dinas Perhubungan, Nomenklatur Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi DT. I Jawa Barat Cabang Kotamadya DT. II Bandung sampai dengan tahun 1997;
- Dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 dirubah menjadi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya DT.II Bandung;
- Dan sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang menjadi Dinas Perhubungan Kota Bandung.

C. Tugas dan Fungsi

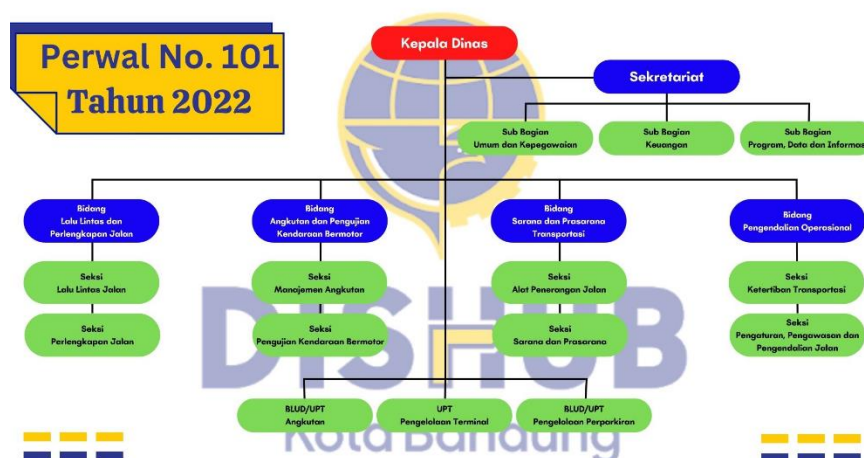
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan lingkup Perhubungan;
- Pelaksanaan kebijakan lingkup Perhubungan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Perhubungan;
- Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN





D. Isu Strategis

Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam 3 (tiga) tahun ke depan yaitu :

- Penanganan kemacetan di 8 ruas jalan pada tahun 2024
- Penanganan kemacetan di 8 ruas jalan pada tahun 2025
- Penanganan kemacetan di 8 ruas jalan pada tahun 2026

Sesuai hasil survey yang dilakukan terhadap 115 ruas jalan sampai dengan akhir 2023 ternyata masih ada 36 ruas jalan masih dalam kategori macet / Level of Service ada di level D dan E. Dari hasil survey tersebut dapat diketahui bahwa terdapat aspek penyebab kemacetan. Adapun yang menjadi aspek penyebab kemacetan diantaranya :

a. Urusan Perhubungan

1. Ngetem Angkutan Umum
2. Parkir Liar On Street
3. Penyebrangan Jalan/Gerakan Pejalan Kaki
4. APILL Persimpangan
5. Disiplin Pengemudi Angkutan Umum
6. Marka/Rambu belum ada/kurang

b. Urusan Non Perhubungan

1. Aksesibilitas Gang/Jalan
2. Aksesibilitas keluar masuk area pertokoan/pendidikan
3. Pasar Tumpah
4. PKL
5. Banjir/Genangan
6. Kualitas/kondisi infrastruktur jalan
7. Perlintasan Sebidang KA
8. Volume lalulintas yang tinggi
9. Pola Pergerakan Commuter



E. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.



F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Nomor TU.01.02/2836-Dishub/VII/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Pj. Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat



dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perhubungan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024-2026 adalah Terwujudnya sistem transportasi kota yang lebih baik untuk mendukung Kota Bandung sebagai kota yang unggul nyaman dan sejahtera.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Menciptakan kondisi lalu lintas yang aman nyaman tertib dan terkendali;
- b. Menyediakan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman;
- c. Menyediakan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai;
- d. Meningkatkan profesionalisme aparat Dinas Perhubungan Kota Bandung



3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 sebanyak 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kelayak hunian kota aspek transportasi	Meningkatnya Kualitas Lalu Lintas dan Angkutan	Persentase Penurunan Kemacetan Lingkup Urusan Perhubungan	7.58	6.34	4.22
			Rasio Pengguna angkutan umum vs pengguna angkutan pribadi	1:3.601	1:3,549	1;3,497
			Indeks fatalitas 10.000 kendaraan lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	0.885	0.835	0.785
			Indeks fatalitas 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	6.500	6.450	6.400
			Persentase konektivitas jalan yang sudah terlayani angkutan umum	36.58	36.88	37.18
2	Meningkatnya kelayak hunian kota aspek transportasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.50	85.75	86.00

**B. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Pj. Walikota Bandung Nomor : Tahun tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2024-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Lalu Lintas dan Angkutan	Persentase Penurunan Kemacetan Lingkup Urusan Perhubungan	%	Permenhub 96 tahun 2015 dan MKJI 1997	Jumlah aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan dibagi jumlah total aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan x 100%	Aspek penyebab kemacetan dapat dinyatakan teratasi apabila di Ruas Jalan tersebut tingkat pelayanan ada di Level C, B dan A (kecepatan = 21 km/jam dan v/c ratio = 0,8
		Rasio Pengguna angkutan umum vs pengguna angkutan pribadi	rasio	Pengguna angkutan pribadi masih mendominasi pengguna sarana transportasi di jalan sehingga kapasitas jalan semakin lama semakin padat	Membuat perbandingan pengguna kendaraan umum dengan kendaraan pribadi	Sarana angkutan umum adalah sarana angkutan yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum



2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Permenpan no 14 tahun 2017	$\text{NRR per Responden} = \frac{\text{Jumlah Nilai Responden}}{\text{Jumlah Responden}}$ $\text{NRR tertimbang per unsur} = \frac{\text{NRR per Responden}}{9}$ $\text{Nilai indeks} = \frac{\text{Jumlah NRR tertimbang per unsur}}{\text{IKM Pelayanan}} \times (100\% : 4 \text{ indeks})$	Semakin tinggi nilai indeks yang diperoleh maka semakin baik pelayanan Dishub terhadap masyarakat dan tingkat kepuasan masyarakatnya semakin tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Lalu Lintas dan Angkutan	Indeks fatalitas 10.000 kendaraan lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	Indeks	Perpres no 1 tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan	Sesuai perhitungan berdasarkan data hasil survey	Semakin kecil/rendah nilai indeksnya maka hal ini menunjukkan semakin kecil jumlah korbannya atau semakin berkeselamatan
		Indeks fatalitas 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	Indeks	Perpres no 1 tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan	Sesuai perhitungan berdasarkan data hasil survey	Semakin kecil/rendah nilai indeksnya maka hal ini menunjukkan semakin kecil jumlah korbannya atau semakin berkeselamatan
		Persentase konektivitas jalan yang sudah terlayani angkutan umum	%	Tingkat coverage layanan angkutan umum	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan yang sudah dilayani angkutan umum}}{\text{panjang jalan total}} \times 100\%$	Semakin tinggi konektivitas jalan yang terlayani angkutan umum atau persentasenya maka semakin banyak area jalan yang sudah dilayani angkutan umum yang berarti semakin baik pelayanan angkutan umum bagi masyarakat

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Lalu Lintas dan Angkutan	Persentase Penurunan Kemacetan Lingkup Urusan Perhubungan	7.58
		Rasio Pengguna angkutan umum vs pengguna angkutan pribadi	1:3.601
		Indeks fatalitas 10.000 kendaraan lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	0.885
		Indeks fatalitas 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	6.500
		Persentase konektivitas jalan yang sudah terlayani angkutan umum	36.58
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.50

2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2024, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Perhubungan terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Perhubungan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Perhubungan Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kelayak hunian kota	Meningkatnya Kualitas Lalu Lintas	Persentase Penurunan	%	7.58	6.34	4.22



	aspek transportasi	dan Angkutan	Kemacetan Lingkup Urusan Perhubungan				
			Rasio Pengguna angkutan umum vs pengguna angkutan pribadi	rasio	1:3.601	1:3,549	1;3,497
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85.50	85.75	86.00
		Meningkatnya Kualitas Lalu Lintas dan Angkutan	Indeks fatalitas 10.000 kendaraan lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	Indeks	0.885	0.835	0.785
			Indeks fatalitas 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	Indeks	6.500	6.450	6.400
			Persentase konektivitas jalan yang sudah terlayani angkutan umum	%	36.58	36.88	37.18

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Kualitas Lalu Lintas dan Angkutan	Persentase Penurunan Kemacetan Lingkup Urusan Perhubungan	%	Permenhub 96 tahun 2015 dan MKJI 1997	Jumlah aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan dibagi jumlah total aspek penyebab kemacetan urusan perhubunganx100%		Aspek penyebab kemacetan dapat dinyatakan teratasi apabila di Ruas Jalan tersebut tingkat pelayanan ada di Level C, B dan A (kecepatan = 21 km/jam dan v/c ratio = 0,8
		Rasio Pengguna angkutan umum vs pengguna angkutan pribadi	rasio	Pengguna angkutan pribadi masih mendominasi pengguna sarana transportasi di jalan sehingga kapasitas jalan semakin lama semakin padat	Membuat perbandingan pengguna kendaraan umum dengan kendaraan pribadi		Sarana angkutan umum adalah sarana angkutan yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum
		Indeks fatalitas 10.000 kendaraan lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	Indeks	Perpres no 1 tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan	Sesuai perhitungan berdasarkan datahasilsurvey		Semakin kecil/rendah nilai indeksnya maka hal ini menunjukkan semakin kecil jumlahkorbannya atau semakin berkeselamatan



		Indeks fatalitas 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	Indeks	Perpres no 1 tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan	Sesuai perhitungan berdasarkan datahasilsurvey		Semakin kecil/rendah nilai indeksnya maka hal ini menunjukkan semakin kecil jumlahkorbannya atau semakin berkeselamatan
		Persentase konektivitas jalan yang sudah terlayani angkutan umum	%	Tingkat coverage layanan angkutan umum	Jumlah panjang jalan yang sudah dilayani angkutan umum dibagi panjang jalan total x 100%		Semakin tinggi konektivitas jalan yang terlayani angkutan umum atau persentasenya maka semakin banyak area jalan yang sudah dilayaniangkutanumum yang berarti semakin baik pelayanan angkutan umum bagi masyarakat
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Permenpan no 14 tahun 2017	$\text{NRR per Responden} = \frac{\text{Jumlah Nilai Responden}}{\text{Jumlah Responden}}$ $\text{NRR tertimbang per unsur} = \frac{\text{NRR per Responden}}{9}$ $\text{Nilai indeks} = \frac{\text{Jumlah NRR tertimbang per unsur}}{\text{IKM Pelayanan}}$ $\text{Nilai Indeks} = \frac{\text{Nilai Indeks} \times (100\% : 4 \text{ indeks})}{1}$		Semakin tinggi nilai indeks yang diperoleh maka semakin baik pelayanan Dishub terhadap masyarakat dan tingkat kepuasan masyarakatnyasemakin tinggi



C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan Pj. Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Lalu Lintas dan Angkutan	Persentase Penurunan Kemacetan Lingkup Urusan Perhubungan	%	7.58
		Rasio Pengguna angkutan umum vs pengguna angkutan pribadi	rasio	1:3.601
		Indeks fatalitas 10.000 kendaraan lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	Indeks	0.885
		Indeks fatalitas 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	Indeks	6.500
		Persentase konektivitas jalan yang sudah terlayani angkutan umum	%	36.58
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85.50

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bandung
Tahun 2024**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan berdasarkan Keputusan Pj. Walikota Bandung Nomor : KP.12.02/1575-DISHUB/III/2024 Tahun 2024, telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 5 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perhubungan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : KP.12.02/1575-DISHUB/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan melalui Keputusan Pj. Walikota Bandung Nomor : tentang Indikator Kinerja Utama Kota



Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perhubungan Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Kota Bandung
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Penurunan Kemacetan Lingkup Urusan Perhubungan	%	7.58	7.70	98.42
2	Rasio Pengguna angkutan umum vs pengguna angkutan pribadi	rasio	1:3.601	1:3.350	106.97
3	Indeks fatalitas 10.000 kendaraan lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	Indeks	0.885	1.000	87.01
4	Indeks fatalitas 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	Indeks	6.500	8.800	64.62
5	Persentase konektivitas jalan yang sudah terlayani angkutan umum	%	36.58	36.24	99.07
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85.50	85.72	100.54

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Rasio Pengguna angkutan umum vs pengguna angkutan pribadi, dengan capaian kinerja 106.97 %, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 100.26 %.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Penurunan Kemacetan Lingkup Urusan Perhubungan, dengan capaian kinerja 98.42 %, pada indikator Indeks fatalitas 10.000 kendaraan lingkup pilar



kendaraan yang berkeselamatan, dengan capaian kinerja 87.01 %, pada indikator Indeks fatalitas 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan, dengan capaian kinerja 64.62 %, pada indikator Persentase konektivitas jalan yang sudah terlayani angkutan umum, dengan capaian kinerja 99.07 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perhubungan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024-2026 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2024 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 6 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Penurunan Kemacetan Lingkup Urusan Perhubungan	%	7.58	7.70	98.42
2	Rasio Pengguna angkutan umum vs pengguna angkutan pribadi	rasio	1:3.601	1:3.350	106.97
3	Indeks fatalitas 10.000 kendaraan lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	Indeks	0.885	1.000	87.01
4	Indeks fatalitas 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	Indeks	6.500	8.800	64.62
5	Persentase konektivitas jalan yang sudah terlayani angkutan umum	%	36.58	36.24	99.07
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85.50	85.72	100.26

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	33.33 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	66.67 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	6	2	33.33	0	0.00	4	66.67
	Jumlah	6	2	33.33	0	0.00	4	66.67

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 6 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	6	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	33.33 %



2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	4	66.67 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2024-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Lalu Lintas dan Angkutan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Lalu Lintas dan Angkutan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Database Awal		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Penurunan Kemacetan Lingkup Urusan Perhubungan	%	8.20	8.20	100.00	7.58	7.70	98.42
2	Rasio Pengguna angkutan umum vs pengguna angkutan pribadi	rasio	1:3.654	1:3.654	100.00	1:3.601	1:3.350	106.97
3	Indeks fatalitas 10.000 kendaraan lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	Indeks	0.900	0.900	100.00	0.885	1.000	87.01
4	Indeks fatalitas 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	Indeks	6.700	6.700	100.00	6.500	8.800	64.62
5	Persentase konektivitas jalan yang sudah terlayani angkutan umum	%	36.24	36.24	100.00	36.58	36.24	99.07

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lalu Lintas dan Angkutan dapat dilihat dari sebanyak 5 indikator yaitu :

Dari 805 aspek penyebab kemacetan, di tahun 2023 tersisa sebanyak 66 aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan sehingga persentase penurunan kemacetan lingkup urusan perhubungan pada tahun 2023 sebesar 8.20%

Pada Triwulan 1 Tahun 2024 jumlah aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan yang teratasi sebanyak 1 aspek di jalan BUAH BATU (Sp.4 PELAJAR PEJUANG 45 - Sp.4 SOEKARNO HATTA). Capaian kinerja presentase penurunan kemacetan lingkup urusan perhubungan sebesar $65/805 \times 100\% = 8,07\%$ dengan target 8.07%, sehingga dapat dikatakan presentase penurunan kemacetan lingkup urusan perhubungan sudah mencapai target sebesar 100%.

Kemudian pada Triwulan 2 Tahun 2024 jumlah aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan yang teratasi sebanyak 1 aspek di jalan BRAGA dan Jalan NARIPAN sehingga sampai triwulan 2 sudah tertangani sebanyak 2 aspek penyebab kemacetan. Capaian kinerja presentase penurunan kemacetan lingkup urusan

perhubungan sebesar $64/805 \times 100\% = 7,95\%$ dengan target 7,95%, sehingga dapat dikatakan presentase penurunan kemacetan lingkup urusan perhubungan sudah mencapai target sebesar 100%.

Dan pada Triwulan 3 Tahun 2023 jumlah aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan yang teratasi sebanyak 1 aspek di Jalan SUKAJADI dan Jalan W.R. SUPRATMAN sehingga sampai triwulan 3 sudah tertangani sebanyak 3 aspek penyebab kemacetan. Capaian kinerja presentase penurunan kemacetan lingkup urusan perhubungan sebesar $63/805 \times 100\% = 7,83\%$ dengan target 7,83%, sehingga dapat dikatakan presentase penurunan kemacetan lingkup urusan perhubungan sudah mencapai target sebesar 100%.

Pada Triwulan 4 Tahun 2024 jumlah aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan yang teratasi sebanyak 1 aspek dari target 2 aspek di Jalan CIWASTRA, sehingga sampai triwulan 4 sudah tertangani sebanyak 4 aspek penyebab kemacetan. Capaian kinerja presentase penurunan kemacetan lingkup urusan perhubungan sebesar $62/805 \times 100\% = 7,70\%$ dengan target 7,58%, sehingga dapat dikatakan presentase penurunan kemacetan lingkup urusan perhubungan sudah mencapai target sebesar 98.42%. Pada triwulan 4 ini target tidak tercapai karena ruas jalan yang tertangani di triwulan 4 ini hanya sebanyak 1 ruas jalan di Jalan CIWASTRA dari target 3 ruas jalan yaitu Jalan CIWASTRA, Jalan CIKUTRA BARAT dan Jalan SURYA SUMANTRI.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Penurunan Kemacetan Lingkup Urusan Perhubungan" adalah sebesar 7.70 dari target sebesar 7.58 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98.42 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Realisasi kinerja tahun ini sebesar 98.42% menurun dari realisasi kinerja tahun sebelumnya sebesar 100%.

Tahun 2024 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Penurunan Kemacetan Lingkup Urusan Perhubungan" tahun ini adalah sebesar 98.42 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan maka capaian kinerjanya mencapai 87.38 %.



Capaian kinerja nyata indikator 2 "Rasio Pengguna angkutan umum vs pengguna angkutan pribadi" adalah sebesar 1:3.350 dari target sebesar 1:3.601 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 106.97 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 2 "Rasio Pengguna angkutan umum vs pengguna angkutan pribadi" tahun ini adalah sebesar 106.97 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan maka capaian kinerjanya mencapai 104.37 %.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Indeks fatalitas 10.000 kendaraan lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan" adalah sebesar 1.000 dari target sebesar 0.885 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 87.01 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 3 "Indeks fatalitas 10.000 kendaraan lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan" tahun ini adalah sebesar 87.01 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan maka capaian kinerjanya mencapai 72.61 %.

Capaian kinerja nyata indikator 4 "Indeks fatalitas 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan" adalah sebesar 8.800 dari target sebesar 6.500 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 64.62 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 4 "Indeks fatalitas 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan" tahun ini adalah sebesar 64.62 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan maka capaian kinerjanya mencapai 62.50 %.

Capaian kinerja nyata indikator 5 "Persentase konektivitas jalan yang sudah terlayani angkutan umum" adalah sebesar 36.24 dari target sebesar 36.58 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99.07 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.



Tahun 2024 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 5 "Persentase konektivitas jalan yang sudah terlayani angkutan umum" tahun ini adalah sebesar 99.07 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan maka capaian kinerjanya mencapai 97.47 %.

Capaian kinerja sasaran 1 ini belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja instansi lainnya di Kota/Kabupaten lain karena indikator di tiap Kota/Kabupaten berbeda-beda, dan sampai saat laporan ini dibuat belum mendapatkan Kota/Kabupaten lain yg menggunakan indikator yg sama.

Capaian kinerja sasaran 1 ini juga tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional mengingat belum ada ketetapan resmi dari Kementrian Perhubungan Republik Indonesia tentang standar dari ke 5 indikator diatas.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase Tingkat pelayanan jalan terdapat beberapa factor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Adanya kerja sama yang baik antar stake holder dalam menangani kemacetan di 8 ruas jalan yang telah ditentukan.

Faktor Penghambat :

1. Kurang disiplinnya pengguna jalan dalam menaati peraturan lalu lintas.
2. Untuk beberapa pekerjaan yg berbeda lokasi, lebih efektif apabila paket pekerjaannya dipisah, namun ada arahan dari BPK agar beberapa paket yg lokasinya berdekatan harus digabung, sehingga menghambat dalam pengkoordinasian paket pekerjaan tersebut (contoh : pekerjaan fasilitas perlengkapan jalan).
3. Terbatasnya petugas di lapangan.
4. Fasilitas sarana prasaran angkutan umum massal belum optimal sehingga masih banyak yang enggan menggunakan kendaraan umum dan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.
5. Pertumbuhan kendaraan lebih besar dibanding pertumbuhan jalan



Solusi :

1. Bekerja sama dengan dengan berbagai stake holder salah satunya dengan pihak kepolisian dalam melakukan penertiban dan sosialisasi tertib lalu lintas kepada para pengguna lalu lintas
2. Tetap berkoordinasi dengan inspektorat, BPK, dan LKPP dalam perumusan paket-paket pekerjaan.
3. Menambah jumlah petugas di lapangan.
4. Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana angkutan umum agar pengguna kendaraan pribadi mau berpindah menggunakan kendaraan umum.
5. Bekerja sama dengan instansi lain untuk menambah kapasitas jalan dan mengurangi hambatan samping.

Analisis tentang efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijelaskan sebagai berikut: Dari jumlah anggaran program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang tersedia sebesar Rp 147.403.986.649 (APBD dan BLUD) dapat terealisasi sebesar Rp. 130.013.100.192 atau sebesar 88.20 %, secara Capaian kinerja sebesar 91.22% sehingga didapat tingkat efisiensi sebesar $100.00\% - 88.20\% = 11.80\%$. Sedangkan nilai efektifitas didapat sebesar $100.00\% / 88.20\% = 113.37\%$. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Perhubungan

Periode 2024 - 2026

Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)			Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Lalu Lintas dan Angkutan	1.1 Persentase Penurunan Kemacetan Lingkup Urusan Perhubungan	%	7.58	7.70	98.42	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	147.403.986.649	130.013.100.192	88.20
		1.2 Rasio Pengguna angkutan umum vs pengguna angkutan pribadi	rasio	1:3.601	1:3.350	106.97					
		1.3 Indeks fatalitas 10.000 kendaraan lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	Indeks	0.885	1.000	87.01					
		1.4 Indeks fatalitas 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	Indeks	6.500	8.800	64.62					
		1.5 Persentase konektivitas jalan yang sudah terlayani angkutan umum	%	36.58	36.24	99.07					
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 5 INDIKATOR				91.22	TOTAL PER SASARAN				88.20

TINGKAT EFISIENSI 11.80 %

TINGKAT EFEKTIFITAS 113.37 %



Untuk mendukung pencapaian persentase tingkat pelayanan jalan tentunya dijabarkan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan. Berikut analisis program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 yaitu :

NO	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Out put	Anggaran	Penyerapan	Analisis
A	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penurunan Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	7.70	147.403.986.649	130.013.100.192	- Data eksisting ada 805 aspek, 66 aspek masih kategori merah, tahun ini sudah diselesaikan 4 aspek jadi tinggal 62 aspek. Formula perhitungan $62/805 = 7.70\%$
		Persentase Peningkatan Pengguna Saran Angkutan Umum	22.990			Berdasarkan hasil kajian jumlah penumpang angkutan umum sebanyak 92.689 orang, jumlah penumpang kendaraan pribadi sebanyak 310.479 orang. Formula perhitungan $92.689/(92.689+310.479) \times 100\% = 22.99\%$
1	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	11 Dokumen	4.210.389.220	3.528.206.550	Dari target 11 dokumen telah terealisasi 11 dokumen dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 11/11 \times 100\% = 100\%$
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi bidang perhubungan	11 Dokumen	4.210.389.220	3.528.206.550	Dari target 11 dokumen telah terealisasi 11 dokumen dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 11/11 \times 100\% = 100\%$



2	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	7 Jenis	100.209.707.122	86.075.388.394	Dari target jenis telah terealisasi 2 jenis dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 2/3 \times 100\% = 66.67\%$
		Jumlah jenis prasarana jalan yang tersedia	5 Jenis			Dari target 2 jenis telah terealisasi 2 jenis dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 2/2 \times 100\% = 100\%$
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jembatan penyeberangan orang yang dibangun	-	62.891.226.404	53.455.991.835	Dari target 1 unit telah terealisasi 0 unit dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 0/1 \times 100\% = 0\%$ (Target tidak tercapai)
		Jumlah PJU yang dibangun	1107 Unit			Dari target 1107 unit telah terealisasi 1107 unit dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 1107/1107 \times 100\% = 100\%$
		Jumlah PJJ yang dibangun	4272 Unit			Dari target 4272 buah telah terealisasi 4272 buah dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 4272/4272 \times 100\% = 100\%$
		Jumlah halte yang dibangun	1 Unit			Dari target 1 buah telah terealisasi 1 buah dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 1/1 \times 100\% = 100\%$
		Jumlah doc bike sharing yang dibangun	-			Dari target 2 unit telah terealisasi 0 unit dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 0/2 \times 100\% = 0\%$ (target tidak tercapai)
		Jumlah doc bike sharing electric yang dibangun	-			Dari target 2 unit telah terealisasi 0 unit dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 0/2 \times 100\% = 0\%$ (target tidak tercapai)
		Jumlah signage yang dibangun	8 Unit			Dari target 8 buah telah terealisasi 8 buah dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 8/8 \times 100\% = 100\%$
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang	177 buah	9.817.801.450	9.505.805.086	Dari target 177 buah telah terealisasi 177 buah dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 177/177 \times 100\% = 100\%$
		Jumlah marka jalan (Thermo plastic) yang terpasang	38000m'			Dari target 38000 m' telah terealisasi 38000 m' dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 38000/38000 \times 100\% = 100\%$
		Jumlah cermin tikungan yang terpasang	309 buah			Dari target 309 buah telah terealisasi 309 buah dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 309/309 \times 100\% = 100\%$
		Jumlah warning light yang terpasang	15 buah			Dari target 15 buah telah terealisasi 15 buah dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 15/15 \times 100\% = 100\%$
		Jumlah marka jalan (Cold plastic) yang terpasang	1300 m2			Dari target 1300 m2 telah terealisasi 1300 m2 dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 1300/1300 \times 100\% = 100\%$



Dinas Perhubungan

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Jembatan Penyeberangan orang yang dipelihara	6 Unit	21.487.631.106	18.023.845.161	Dari target 6 Unit telah terealisasi 6 Unit dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 6/6 \times 100\% = 100\%$
		Jumlah halte yang dipelihara	6 Unit			Dari target 6 Unit telah terealisasi 6 Unit dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 6/6 \times 100\% = 100\%$
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah titik ATCS yang dipelihara	146 Titik	6.013.048.162	5.089.746.312	Dari target 146 titik telah terealisasi 146 titik dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 146/146 \times 100\% = 100\%$
3	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang Dikelola (Lokasi)	10 Lokasi	6.316.523.317	5.991.780.331	Dari target 10 lokasi telah terealisasi 10 lokasi dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 10/10 \times 100\% = 100\%$
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal yang dikembangkan fasilitas utama dan penunjang	3 Unit	4.260.117.224	4.072.560.655	Dari target 3 unit telah terealisasi 3 Unit dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 3/3 \times 100\% = 100\%$
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah terminal tipe C yang dipelihara	10 Unit	2.056.406.093	1.919.219.676	Dari target 10 Unit telah terealisasi 10 Unit dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 10/10 \times 100\% = 100\%$
4	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang diuji	66005 Unit	7.416.480.007	6.585.639.799	Dari target 66000 unit telah terealisasi 66005 unit dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 66005/66000 \times 100\% = 100.01\%$
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor	1 Set	272.988.994	253.131.726	Dari target 1 set telah terealisasi 1 set dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 1/1 \times 100\% = 100\%$
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji petik emisi gas buang kendaraan bermotor	6 Kali	86.648.905	64.533.900	Dari target 6 kali telah terealisasi 6 kali dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 6/6 \times 100\% = 100\%$
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang di uji	66000 Unit	4.452.539.730	3.843.806.663	Dari target 66000 Unit telah terealisasi 66000 unit dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 66000/66000 \times 100\% = 100\%$
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	1.888.681.376	1.738.977.090	Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 4/4 \times 100\% = 100\%$
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	5 Set	715.621.002	685.190.420	Dari target 5 set telah terealisasi 5 set dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 5/5 \times 100\% = 100\%$
5	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan pengaturan lalu lintas	4 Laporan	11.851.048.400	11.607.158.570	Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 4/4 \times 100\% = 100\%$
		Laporan manajemen dan penataan rekayasa lalu lintas	4 Laporan			Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 4/4 \times 100\% = 100\%$
		Laporan pelaksanaan	4 Laporan			Dari target 4 laporan telah



Dinas Perhubungan

		forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya				terrealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	200.000.000	198.933.970	Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah laporan pengadaan pemasangan dan pengaturan lalu lintas	12 Laporan	11.151.048.400	11.103.126.250	Dari target 12 laporan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	500.000.000	305.098.350	Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$
6	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	laporan Pengendalian Disiplin Pengoprasian Angkutan di Jalan Raya	4 Laporan	3.789.516.204	3.684.968.050	Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota dan pelaksanaan CFD	4 Laporan	1.380.304.904	1.327.453.300	Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan penertiban parkir liar	12 Laporan	2.409.211.300	2.357.514.750	Dari target 12 laporan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$
7	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah km tempuh Pengoperasian Angkutan Massal Bus Trans Metro Bandung (TMB), dan Bus Sekolah	1636059.8 km	13.610.322.379	12.539.958.498	Dari target 1386462.60 km telah terealisasi 1636059.8 km dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $\frac{1636059.8}{1386462.60} \times 100\% = 118.00\%$
		Jumlah pengguna bike sharing	5143 orang			Dari target 3445 orang telah terealisasi 5143 orang dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $\frac{5143}{3445} \times 100\% = 149.29\%$
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan			Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $\frac{4}{4} \times 100\% = 100.00\%$



		Jumlah kendaraan khusus yang tersedia	2 Unit			Dari target 31 unit telah terealisasi 2 unit dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 2/31 \times 100\% = 6.45\%$
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah km tempuh Pengoperasian Angkutan Massal Bus Trans Metro Bandung (TMB)	Jumlah km tempuh Pengoperasian Angkutan Massal Bus Trans Metro Bandung (TMB)	1280128.9 Km	13.335.780.379	12.405.251.498	Dari target 1279681 km telah terealisasi 1280128.9 Km dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 1280128.9 / 1279681 \times 100\% = 100.04\%$
		Jumlah km tempuh Pengoperasian Angkutan Massal Bus sekolah	106920.52 Km			Dari target 106781.60 km telah terealisasi 106920.52 Km dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 106781.60 / 106920.52 \times 100\% = 100.13\%$
		Pengadaan kendaraan operasional	2 Unit			Dari target 31 unit telah terealisasi 2 unit dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 2/31 \times 100\% = 6.45\%$
		Jumlah pengguna bike sharing	7285 Orang			Dari target 3445 orang telah terealisasi 7285 orang dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 7285/3445 \times 100\% = 211.47\%$
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	274.542.000	134.707.000	Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 4/4 \times 100\% = 100\%$



Dokumentasi Sasaran 1 Meningkatnya Pelayanan Jalan





Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	85.05	100.06	85.50	85.72	100.26

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" adalah sebesar 85.72 dari target sebesar 85.50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.26 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini meningkat 0.20 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.06

Tahun 2024 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini adalah sebesar 100.26 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan maka capaian kinerjanya mencapai 99.67 %.

Capaian kinerja nyata indikator "Kepuasan Masyarakat" Jika dibandingkan dengan kinerja instansi lainnya seperti Dinas Perhubungan Kota Cilegon dengan nilai 83.55 maka nilai Dinas Perhubungan kota Bandung masih lebih baik.

Capaian kinerja IKM Dinas Perhubungan Kota Bandung tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional mengingat belum ada ketetapan resmi dari Capaian kinerja IKM Dinas Perhubungan Kota Bandung tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional mengingat belum ada ketetapan resmi dari Kementrian



Perhubungan Republik Indonesia tentang standar nilai IKM bagi pelayanan di bidang perhubungan di pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Kerja sama yang baik antar stake holder sehingga dirasakan pelayanannya oleh masyarakat.

Faktor Penghambat :

1. Waktu pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat kurang cepat serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung saat pelaksanaan pelayanan

Solusi :

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran kinerja kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.
3. Percepatan waktu pelayanan kepada masyarakat dan sarpras pelayanan yang mendukung.



Analisis tentang efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijelaskan sebagai berikut: Dari jumlah anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia sebesar Rp 104.064.241.632 (APBD dan BLUD) dapat terealisasi sebesar Rp. 74.024.816.172 atau sebesar 71,13% dan Capaian kinerja sebesar 100.26% sehingga didapat tingkat efisiensi sebesar $100.26\% - 71.13\% = 29.13\%$. Sedangkan nilai efektifitas didapat sebesar $100.26\% / 71.13\% = 140.95\%$. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Perhubungan
Periode 2024 - 2026
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program		Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85.50	85.72	100.26	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	104.064.241.632	74.024.816.172	71.13
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					100.26	TOTAL PER SASARAN		104.064.241.632	74.024.816.172	71.13

TINGKAT EFISIENSI 29.13 %

TINGKAT EFEKTIFITAS 140.95 %

Untuk mendukung pencapaian persentase tingkat pelayanan jalan tentunya dijabarkan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan. Berikut analisis program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 2 yaitu :

NO	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/kegiatan/S ub Kegiatan	Out put	Anggaran	Penyerapan	Analisis
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	99.67%	104.064.241.632	74.024.816.172	Rata-rata capaian kinerja dari semua kegiatan di program ini
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	375.000.000	355.018.000	Dari target 5 dokumen telah terealisasi 5 dokumen dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 5/5 \times 100\% = 100\%$
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	375.000.000	355.018.000	Dari target 5 dokumen telah terealisasi 5 dokumen dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 5/5 \times 100\% = 100\%$



2	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	41.327.408.984	39.815.690.675	Dari target 12 laporan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 12/12 \times 100\% = 100\%$
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Laporan	41.327.408.984	39.815.690.675	Dari target 12 laporan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 12/12 \times 100\% = 100\%$
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan	1.420.482.474	1.156.062.200	Dari target 12 Laporan telah terealisasi 12 Laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 12/12 \times 100\% = 100\%$
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	636.866.874	595.150.000	Dari target 3 paket telah terealisasi 3 paket dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 3/3 \times 100\% = 100\%$
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	359 Orang	783.615.600	560.912.200	Dari target 358 orang telah terealisasi 359 orang dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 359/358 \times 100\% = 100,28\%$
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	4.213.977.983	3.493.357.856	Dari target 12 Laporan telah terealisasi 12 Laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 12/12 \times 100\% = 100\%$
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	149.846.850	146.868.540	Dari target 1 Paket telah terealisasi 1 Paket dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 1/1 \times 100\% = 100\%$
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	2.298.162.164	2.141.007.000	Dari target 14 paket telah terealisasi 14 paket dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 14/14 \times 100\% = 100\%$
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	839.314.200	391.703.405	Dari target 12 paket telah terealisasi 12 paket dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 12/12 \times 100\% = 100\%$
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	297.889.169	188.964.150	Dari target 3 paket telah terealisasi 3 paket dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 3/3 \times 100\% = 100\%$
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	223.096.000	219.750.000	Dari target 12 dokumen telah terealisasi 12 dokumen dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 12/12 \times 100\% = 100\%$



Dinas Perhubungan

	Penyelenggaraan Rpat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	405.669.600	405.669.600	Dari target 12 laporan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 12/12 \times 100\% = 100\%$
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	855.610.738	797.860.000	Dari target 12 Laporan telah terealisasi 12 Laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 12/12 \times 100\% = 100\%$
	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	302.039.380	262.225.000	Dari target 8 unit telah terealisasi 2 unit dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 2/8 \times 100\% = 25\%$
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	553.571.358	535.635.000	Dari target 3 paket telah terealisasi 3 paket dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 3/3 \times 100\% = 100\%$
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	7.623.146.778	6.832.175.341	Dari target 12 Laporan telah terealisasi 12 Laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 12/12 \times 100\% = 100\%$
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.300.000	9.300.000	Dari target 12 laporan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 12/12 \times 100\% = 100\%$
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.634.836.875	1.899.747.301	Dari target 12 laporan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 12/12 \times 100\% = 100\%$
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.979.009.903	4.923.128.040	Dari target 12 laporan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 12/12 \times 100\% = 100\%$
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	6.120.999.177	4.171.949.593	Dari target 12 Laporan telah terealisasi 12 Laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 12/12 \times 100\% = 100\%$
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	145 Unit	4.552.905.320	3.627.340.850	Dari target 139 Unit telah terealisasi 145 unit dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 145/139 \times 100\% = 104.32\%$



Dinas Perhubungan

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.037.710.660	157.371.150	Dari target 4 unit telah terealisasi 4 unit dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 4/4 \times 100\% = 100\%$
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	66 Unit	530.383.197	387.237.593	Dari target 251 unit telah terealisasi 66 unit dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 66/251 \times 100\% = 26.29\%$
8	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup BLUD Angkutan	85.80 Indeks	42.127.615.498	17.402.702.507	Dari target 85.50 indeks telah terealisasi 85.80 indeks dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 85.80/85.5 \times 100\% = 100.35\%$
		Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup BLUD Parkir	80.50 Indeks			Dari target 85.5 indeks telah terealisasi 80.50 indeks dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 80.50/85.5 \times 100\% = 94.15\%$
	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Jumlah pengguna layanan BLUD Angkutan UPT Angkutan	905782 orang	8.240.347.806	7.862.190.095	Dari target 839144 orang telah terealisasi 905782 orang dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 905782/839144 \times 100\% = 107.94\%$
		Jumlah pengguna layanan BLUD Parkir UPT Parkir	1202330 orang	33.887.267.692	9.540.512.412	Dari target 1423100 orang telah terealisasi 1202330 orang dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 1202330/1423100 \times 100\% = 84.49\%$

Dokumentasi Sasaran 2 Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima





SASARAN RPD : Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur

INDIKATOR : Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur

TARGET : 7,34 %

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%	Tahun 2026		%	Tahun 2023 Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target
1	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	%	7.66	7.78	101.57	7.76	-		7.86	-		7.86

Dalam perhitungan indeks livable city Kota Bandung tahun 2024, terdapat indikator dalam perhitungan. Indikator tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu indikator objektif dan subjektif. Indikator tersebut berdasarkan kepada 9 aspek yang digunakan dalam RPD Kota Bandung tahun 2024-2026 antara lain Aspek Pendidikan, Aspek Kesehatan, Aspek Ketenteraman, Aspek Sosial, Aspek Tata Ruang, Aspek Lingkungan, Aspek Transportasi, Aspek Infrastruktur dan Utilitas, dan Aspek Ekonomi. Terdapat total 329 indikator dalam penyusunan nilai livable city Kota Bandung tahun 2024. Indikator tersebut terdiri dari 64 indikator subjektif dan 265 indikator objektif yang disusun berdasarkan cascading RPD Kota Bandung tahun 2024-2026. Indikator tersebut juga menjadi data yang digunakan dalam analisis perhitungan indeks livable city.



Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan terhadap 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung, didapatkan perhitungan akhir skor LCI sebagai berikut :

Tabel 5. 10 Hasil Perhitungan Akhir Skor LCI Kota Bandung 2024

No	Kecamatan	Pendidikan	Kesehatan	Ketenteraman	Sosial	Tata Ruang	Lingkungan	Transportasi	Infrastruktur dan Utilitas	Ekonomi	LCI
1	Andir	9.34	9.17	8.35	8.82	7.75	8.74	8.78	8.09	7.19	8.47
2	Antapani	8.94	8.71	8.26	8.51	7.82	8.45	7.95	7.78	6.63	8.12
3	Arcamanik	8.59	8.49	8.03	8.37	7.61	8.23	7.97	7.53	6.72	7.95
4	Astanaanyar	8.79	8.70	8.04	8.00	7.64	8.32	8.38	7.71	6.72	8.03
5	Babakan Ciparay	8.44	8.43	7.84	8.21	7.13	8.12	8.02	7.39	6.47	7.78
6	Bandung Kidul	8.50	8.37	7.84	8.23	7.59	7.71	7.58	7.35	6.81	7.78
7	Bandung Kulon	8.41	8.44	7.80	8.32	7.09	8.26	7.91	7.46	6.36	7.78
8	Bandung Wetan	8.27	8.18	7.59	7.67	6.82	7.70	7.72	6.93	6.42	7.48
9	Batununggal	8.58	8.62	7.97	8.47	7.04	8.43	8.06	7.66	6.88	7.97
10	Bojongloa Kaler	8.33	8.24	7.64	8.39	7.13	7.52	7.94	7.14	6.60	7.66
11	Bojongloa Kidul	8.52	8.73	8.06	8.16	7.39	8.30	8.14	7.56	6.59	7.94
12	Buahbatu	8.45	8.35	7.70	8.17	7.42	8.18	8.03	7.50	6.80	7.84
13	Cibeunying Kaler	8.73	8.61	7.93	8.21	7.67	8.54	8.27	7.64	7.13	8.08
14	Cibeunying Kidul	8.59	8.70	8.05	8.31	7.60	8.25	8.07	7.47	6.83	7.99
15	Cibiru	8.87	8.63	7.97	8.85	7.46	8.43	7.97	7.67	6.74	8.06
16	Cicendo	8.89	8.72	7.99	8.48	7.05	8.11	8.09	7.35	6.63	7.92
17	Cidadap	8.37	8.68	7.94	8.32	7.36	8.55	8.38	7.70	6.75	8.01
18	Cinambo	8.81	8.77	8.01	8.47	7.26	8.53	8.18	7.76	7.28	8.12
19	Coblong	8.19	8.36	7.80	7.99	7.26	8.19	8.18	7.40	6.49	7.76
20	Gedebage	9.03	8.83	7.94	9.04	7.64	8.43	8.06	7.76	7.18	8.21
21	Kiaracondong	8.59	8.73	7.83	8.44	7.21	8.39	7.91	7.60	6.56	7.92
22	Lengkong	8.35	8.15	7.64	7.94	7.38	7.93	7.68	7.26	6.65	7.67
23	Mandalajati	8.33	8.55	8.16	8.41	7.60	8.12	7.80	7.31	6.34	7.84
24	Panyileukan	8.75	8.74	8.03	8.48	7.98	8.43	8.16	7.83	7.24	8.18
25	Rancasari	8.50	8.35	7.63	8.33	7.40	8.08	7.75	7.32	6.68	7.78
26	Regol	7.88	7.42	7.10	8.27	6.39	7.42	7.25	6.77	6.47	7.22
27	Sukajadi	8.92	8.81	8.22	8.56	7.17	8.27	8.34	7.58	6.71	8.06
28	Sukasari	8.45	8.59	8.02	8.11	7.53	8.55	8.53	7.85	7.14	8.09
29	Sumur Bandung	8.06	7.97	7.48	7.67	6.70	7.53	7.58	6.94	6.17	7.34
30	Ujung Berung	8.87	8.67	7.54	8.27	7.91	8.42	8.21	7.61	6.83	8.04
	Rerata	8.58	8.52	7.88	8.32	7.37	8.20	8.03	7.50	6.73	7.90

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan pengelompokan aspek, didapatkan nilai dari livable city Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 5. 11 Hasil Perhitungan Nilai LCI Berdasarkan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya			
Aspek	Skor	Skor Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya	Target 2024
Aspek Kesehatan	8.52	8.33	7.81
Aspek Pendidikan	8.58		
Aspek Ketenteraman	7.88		
Aspek Sosial	8.32		
Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Infrastruktur			
Aspek	Skor	Skor Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Infrastruktur	Target 2024
Aspek Tata Ruang	7.37	7.78	7.66
Aspek Lingkungan	8.2		
Aspek Transportasi	8.03		
Aspek Infrastruktur-Utilitas	7.5		
Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi			
Aspek	Skor	Skor Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi	Target 2024
Aspek Ekonomi	6.73	6.73	7.15

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Adapun ruas jalan yang diatasi pada tahun 2024 yaitu, berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, berada di Jalan Buah Batu (Sp.4 PELAJAR PEJUANG 45 - Sp.4 Soekarno Hatta), Jl. Naripan, Jl. Braga, Jl. Sukajadi, Jl. W.R. Supratman, Dan Jl. Ciwastra. Dari hasil survey di lapangan didapat data-data sebagai berikut :

NO	RUAS JALAN		RENCANA AKSI PENAGGULANGAN KEMACETAN
Ruas Jalan yang di Atasi Tahun 2024			
1	Jalan BUAH BATU (Sp.4 PELAJAR PEJUANG 45 - Sp.4 SOEKARNO HATTA)		
	Aspek penyebab kemacetan : Urusan Perhubungan		
	1	Parkir Liar On Street Jl Buah Batu	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	Aspek penyebab kemacetan : Urusan Non Perhubungan		
	1	Aksesibilitas Gang / Jalan Buah Batu Regency	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban serta berkoordinasi dengan DSDABM
	2	Aksesibilitas keluar masuk area pertokoan / pendidikan Griya Buah Batu	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban serta berkoordinasi dengan Disperindag
2	JL. NARIPAN		
	Aspek penyebab kemacetan : Urusan Non Perhubungan		
	1	Aksesibilitas Gang / Jalan Sp. Jl Sunda – Jl. Naripan	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban serta berkoordinasi dengan DSDABM
	2	Aksesibilitas keluar masuk area pertokoan / pendidikan Sp. Jl Sunda – Jl. Naripan	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban serta berkoordinasi dengan Disdik/Disperindag
	3	Volume lalu lintas yang tinggi Sp Jl. Naripan – Jl. Braga	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban serta berkoordinasi dengan kepolisian dan intansi terkait lainnya
	JL. BRAGA		
	Aspek penyebab kemacetan : Urusan Perhubungan		
	1	Pejalan Kaki yang tidak pada tempatnya S sepanjang Jl. Braga	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	Aspek penyebab kemacetan : Urusan Non Perhubungan		
	1	Aksesibilitas Gang / Jalan S sepanjang Jl. Braga	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban serta berkoordinasi dengan DSDABM
3	2	Aksesibilitas keluar masuk area pertokoan / pendidikan S sepanjang Jl. Braga	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban serta berkoordinasi dengan Disdik/Disperindag
	3	Volume lalu lintas yang tinggi S sepanjang Jl. Braga	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban serta berkoordinasi dengan kepolisian dan intansi terkait lainnya



4	JL. SUKAJADI		
	Aspek penyebab kemacetan : Urusan Perhubungan		
	1 Ngetem angkutan umum	Sepanjang Jl. Sukajadi	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	Aspek penyebab kemacetan : Urusan Non Perhubungan		
	1 Aksesibilitas Gang / Jalan	Jl. Karang Tinggal	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban serta berkoordinasi dengan DSDABM
	2 Aksesibilitas keluar masuk area pertokoan / pendidikan	PVJ	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban serta berkoordinasi dengan Disdik/Disperindag
	3 PKL	Sepanjang Jl. Sukajadi	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban serta berkoordinasi dengan SATPOL PP
	4 Volume lalu lintas yang tinggi	PVJ	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban serta berkoordinasi dengan kepolisian dan intansi terkait lainnya
5	JL. W.R. SUPRATMAN		
	Aspek penyebab kemacetan : Urusan Non Perhubungan		
	1 Aksesibilitas keluar masuk area pertokoan / pendidikan	SMPN 14	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban serta berkoordinasi dengan Disdik
	2 Kualitas / kondisi infrastruktur jalan	Sekitar Jl. Lapangan Supratman	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban serta berkoordinasi dengan DSDABM
	3 Volume lalu lintas yang tinggi	Jl. Lapangan Supratman	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban serta berkoordinasi dengan kepolisian dan intansi terkait lainnya
6	JL. CIWASTRA		
	Aspek penyebab kemacetan : Urusan Perhubungan		
	1 Pejalan Kaki yang tidak pada tempatnya	Sepanjang Jl Ciwastra	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	Aspek penyebab kemacetan : Urusan Non Perhubungan		
	1 Aksesibilitas Gang / Jalan	Jl. Manjahlega, Jl. Rancabolang, Jl. Margacinta	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban serta berkoordinasi dengan DSDABM
	2 Aksesibilitas keluar masuk area pertokoan / pendidikan	Pasar Ciwastra	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban serta berkoordinasi dengan Disperindag
	3 Banjir / Genangan	Pasar Ciwastra	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	4 Pola Pergerakan Commuter	Jl. Ranca oray	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban



	5	Volume lalu lintas yang tinggi	Sepanjang Jl. Ciwastra	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban serta berkoordinasi dengan kepolisian dan intansi terkait lainnya
--	---	--------------------------------	------------------------	---

Aspek penyebab kemacetan : URUSAN PERHUBUNGAN

Sementara untuk capaian kinerja program, sisa aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan sampai dengan TW 4 2023 sebanyak 66 aspek, dengan persentase 8.20 %, target di TW 4 2023 sebesar 8.20 %, dan capaian kinerja TW 4 2023 untuk aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan sebesar 100%.

Pada Triwulan 1 2021 berhasil menyelesaikan 1 aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan, sehingga sampai dengan TW 1 2024 sisa aspek penyebab kemacetan sebanyak 65 aspek dengan persentase 8.07%, target di TW 1 2024 sebesar 8.07%, dan capaian kinerja TW 1 2024 untuk aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan sebesar 100%.

Kemudian Triwulan 2 2024 berhasil menyelesaikan 1 aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan, sehingga sampai dengan TW 2 2024 sisa aspek penyebab kemacetan sebanyak 64 aspek dengan persentase 7.95%, target di TW 2 2024 sebesar 7.95%, dan capaian kinerja TW 2 2024 untuk aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan sebesar 100%.

Dan pada Triwulan 3 2024 berhasil menyelesaikan 1 aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan, sehingga sampai dengan TW 3 2024 sisa aspek penyebab kemacetan sebanyak 63 aspek dengan persentase 7.83%, target di TW 3 2024 sebesar 7.83%, dan capaian kinerja TW 3 2024 untuk aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan sebesar 100%.

Pada Triwulan 4 2024 berhasil menyelesaikan 1 aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan, sehingga sampai dengan TW 4 2024 sisa aspek penyebab kemacetan sebanyak 62 aspek dengan persentase 7.70%, target di TW 4 2024 sebesar 7.58%, dan capaian kinerja TW 4 2024 untuk aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan sebesar 98.42%.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 5 indikator dengan nilai 91.22 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.26 %



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 251.468.228.281 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 204.037.916.364, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 47.430.311.917

Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung 2024-2026 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2024, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 5 indikator dengan nilai 91.22 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.26 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 204.037.916.364 (Dua ratus empat miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Perhubungan Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah 81.14 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perhubungan Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

B. Rekomendasi

1. Percepatan pelaksanaan Program Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR)
2. Tingkatkan pendapatan dari Retribusi Terminal, cari strategi baru dan tetapkan target yang lebih cermat dan terukur
3. Tingkatkan capaian kinerja pelayanan BLUD Angkutan dan BLUD Perparkiran dan kemandirian anggaran.
4. Penggunaan Handheld oleh juru parkir untuk mempermudah petugas parkir, meningkatkan pengawasan, sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan parkir.
5. Penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya, tumbuhkan dan sosialisasikan budaya berlalu lintas yang baik secara masif, terutama pada satuan pendidikan dasar.

C. Tindak Lanjut LKPJ

1. Dalam hal penanganan kemacetan dan pendidikan keselamatan lalu lintas telah dilakukan penderekan kendaraan dilakukan sesuai SOP, dan sosialisasi keselamatan lalu lintas yang dilaksanakan untuk tingkat PAUD dan SD. Namun, beberapa fasilitas pendukung masih terkendala anggaran.
2. Melakukan pelatihan, sosialisasi, pengawasan, dan optimalisasi pelayanan transportasi seperti TMB, Bandros, Boseh, dan parkir elektronik untuk peningkatan kinerja BLUD.
3. Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meingkatkan ketertiban, kelancaran dan efektivitas
4. Melakukan Pengaturan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan umum di sepanjang rute BIUTR baik persimpangan maupun ruas jalan , untuk memastikan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas
5. Sosialisasi terhadap STAKEHOLDER di Terminal tentang Perda No.1 Th 2024 Khususnya tentang Sewa Barang Milik Daerah (BMD)

D. Saran

Dalam mencapai sasaran strategis terdapat beberapa hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam pemenuhan target kinerja tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Terlepas dari kondisi kurangnya kedisiplinan dan kesadaran pengguna jalan dalam menaati peraturan lalu lintas dimana hal tersebut menyebabkan kepadatan lalu lintas diruas-ruas jalan rawan kemacetan, namun berkat adanya Kerjasama yang baik antar stake holder maka kondisi di 6 ruas jalan tersebut akhirnya dapat dikendalikan.
2. Waktu percepatan pelayanan kepada masyarakat perlu di tingkatkan agar kepuasan masyarakat dalam pelayanan meningkat.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran kinerja kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat.
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Kota Bandung, Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Perhubungan

Kota Bandung



ASEP KUSWARA, AMa.PKB, ST, MM

NIP. 196708081992031007